



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa bahwasannya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 telah kami susun. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

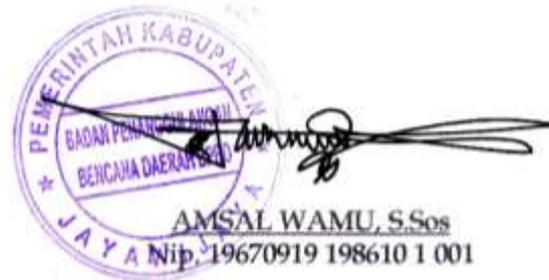
Tujuan penyampaian laporan kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran serta perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran BPBD Kabupaten Jayawijaya.

Kami sadar bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan referensi sehingga kedepan kita dapat mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan kepada kita dengan hasil yang memuaskan, Amiiin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kabupaten Jayawijaya dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wamena, 31 Januari 2022
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah



AMSAL WAMU, S.Sos
Nip. 19670919 198610 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum BPBD	2
A. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD	4
B. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020.....	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Visi	8
2. Misi	9
B. RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	15
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	16
C. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	17
D. AKUNTABILITAS KINERJA	45
BAB IV PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government), diperlukan penerapan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LkjiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap instansi pemerintah. LkjiP Pemerintah Kabupaten Jayawijaya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukurun kinerja. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu penyusunan laporan kinerja juga dilakukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan Lakip BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran BPBD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodic.

I.3 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Jayawijaya

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan penyelenggaraan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana. Kedudukan BPBD Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Struktur Organisasi BPBD kabupaten Jayawijaya 2021 didukung dengan Jumlah Pegawai 15 Orang PNS, dengan Struktur perangkat daerah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II a			
2	Eselon II b	1		1
3	Eselon III a			
4	Eselon III b	2	1	3
5	Eselon IV a	1	1	2
6	Eselon IV b	1	2	3
7	Staf	2	4	6
	Jumlah	7	8	15

b. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	1	1	1
2	S1	6	3	8
3	SMA	2	3	2
	Jumlah	9	6	13

c. Berdasarkan Pangkat/ Golongan

NO	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	4		4
2	Golongan III	3	4	7
3	Golongan II	2	2	4
	Jumlah	9	6	15

d. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

NO	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruh
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Diklat Pim IV	0	0	0
2	Diklat Pim III	0	0	0
3	Diklat Adum	1	0	1
	Jumlah	1	0	1

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Kewenangan

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Terletak di di Jalan Yos Sudarso Gedung Otonom . Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Jayawijaya, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Ex Officio Sekretaris Daerah dan dalam Pelaksanaan Operasional dipimpin Oleh Kepala Pelaksana dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya.

B. Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA,

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategi Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk Setiap pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja samapi dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen perencanaan strategi organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis/program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan perpaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerjanya.

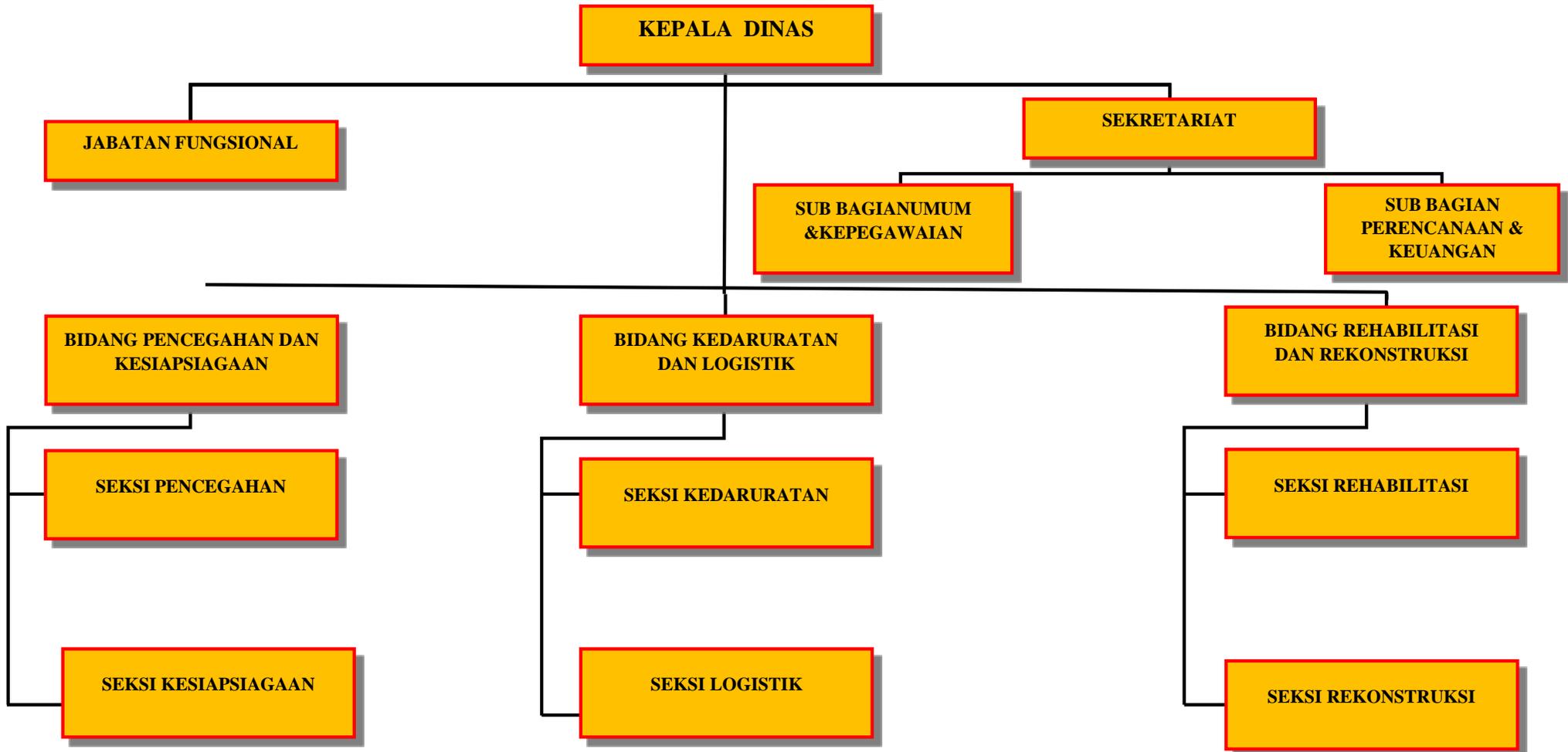
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 2018-2023
- 2) Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2020
- 3) Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021

1.4. Struktur Organisasi BPBD

2.1.2. Struktur Organisasi

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran perangkat daerah, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misi Bupati Terpilih 2018 -2023 Kabupaten Jayawijaya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja perangkat daerah. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 -2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

- B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya Guna mewujudkan Visi Misi Bupati Jayawijaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 -2023 tersebut yaitu:

**Visi : "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,
Berkualitas Dan Berbudaya"**

Misi : Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Terdapat Tujuan BPBD Kabupaten Jayawijaya jangka menengah sebagaimana Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jayawijaya adalah: ‘Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat’

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana

Indikator Sasaran :

- Indeks Risiko Bencan

2. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Indikator Sasaran :

- Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar

3. Meningkatnya Tansparansi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Sasaran :

- Nilai SAKIP
- Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD

Indikator Sasaran yang diemban oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan target sasaran program dan kegiatan dalam merealisasikan tujuan BPBD Kabupaten Jayawijaya.

B. Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi.

Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang dicapai pada tahun 2020 adalah :

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

Tabel.2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program Kinerja Program Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Realisasi 2017	Target 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta									

Perlindungan Masyarakat									
1	Indeks Risiko Bencana		0	115,20 (0%)	115,20 (0%)	109,44 (5%)	103,68 (10%)	92,16 (20%)	80,64 (30%)
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar		100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Nilai SAKIP		-	B 60	B 61	B 62	B 63	B 64	B 64
4	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Tabel.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	103,68
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana sesuai standar	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	60%
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (62)
		Persentase Anggaran yang menjadi	0%

		temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	
--	--	---	--

Tabel 2.3 Anggaran Program/Kegiatan tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 2.730.635.966	DAU
2.	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 101.240.000	DBH
	Jumlah	Rp. 2.831.875.966	

Kegiatan pengurangan risiko bencana maupun tanggap darurat bencana harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Jayawijaya. Keterlibatan mereka sangat berpengaruh dalam keberhasilan merubah paradigma masyarakat dan dunia usaha bahwa paradigma penanggulangan bencana yang sekarang lebih mengutamakan kepada paradigma “preventif” dibanding Paradigma “responsif” yang didukung dengan tersedianya payung hukum Penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pedoman tata kelola penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat Bencana dan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

Tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di masa mendatang semakin besar. Dampak perubahan iklim global semakin nyata dan telah merubah keseimbangan sistem bumi. Temperatur makin meningkat yang menyebabkan berubahnya pola musim sehingga berdampak pada penyediaan sumber air, pangan, energi, dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Faktor antropogenik menyebabkan laju degradasi lingkungan tiga kali lebih cepat daripada pemulihannya. Kondisi sungai dan daerah aliran sungai juga semakin kritis. Indonesia dikelilingi oleh cincin api sehingga jutaan masyarakat berada di daerah rawan bencana. Kesemuanya hal tersebut telah memperparah dampak bencana, sehingga penanganan bencana menjadi lebih kompleks dan multidimensional.

Pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik dalam pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pascabencana. Ini merupakan wujud implementasi dari Nawacita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh masyarakat. Bahkan penanggulangan bencana juga dilakukan di daerah pinggiran, perbatasan, daerah yang sulit diakses, pedesaan, perkotaan, pegunungan, pesisir, dan lainnya yang memang memiliki risiko terjadi bencana. Berubahnya paradigma penanggulangan bencana, dimana penanganan bencana dilakukan secara simultan, tanpa dipisahkan oleh sekat birokrasi dan tahapan penanggulangan bencana yang klasik (tahap pra bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi) sehingga pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan pelayanan masyarakat dapat berfungsi segera secara normal. Kegiatan pengurangan risiko bencana memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah daerah melalui BPBD terus meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan bencana.

Kesetiakawanan sosial, gotong royong dan semangat membantu sesama sebagai wujud panggilan kemanusiaan semakin tinggi sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Dukungan Lembaga Teknis, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, relawan, dan masyarakat telah meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui BPBD Kabupaten Jayawijaya dengan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat terus berupaya pengurangan risiko bencana melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, pengurangan risiko bencana bukan semata-mata sebagai pengeluaran belaka tetapi telah diperhitungkan sebagai investasi pembangunan tetapi Memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan:

- 1) Menumbuhkan industri kebencanaan.
- 2) Penciptaan lapangan kerja serta mendorong majunya IPTEK.
- 3) Meminimalisasi kerugian dan kerusakan hasil pembangunan nasional di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. Pengukuran kinerja menjadi dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran BPBD.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas setidaknya-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Sebagai bagian dari komitmen BPBD Kabupaten Jayawijaya untuk membangun akuntabilitas kinerja ini Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi perangkat daerah atas penggunaan anggaran, pengukuran kerja menyangkut kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus menyatakan dengan indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja utama tersebut harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan dalam hal ini indikator kinerja utama pada BPBD yang merupakan unit organisasi setingkat eselon II sekurang-kurangnya adalah indikator kinerja keluaran (output). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penialain Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	A
2	$76 \leq 90$	Tinggi	B
3	$66 \leq 75$	Sedang	C
4	≤ 65	Rendah	D
5	≤ 50	Sangat Rendah	E

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat di pergunakan dan di laporkan sebagai pertanggungjawaban dari Pelaksanaan atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Oleh sebab itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi, yaitu disebut dengan Indikator Kinerja Utama (key performance indicators), dimana capaian indikator kenerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsi serta peran yang diembannya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023, maka BPBD telah menyusun indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi BPBD . Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan pada tabel dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta kedepan BPBD secara konsisten dan kontinu melakukan reviu terhadap indikator

kinerja utama agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian indikator kinerja utama pemerintah kabupaten Jayawijaya.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi
				Target	Target	Target	Target	Target	Kinerja Akhir
1	Indeks Risiko Bencana	-	115,20 (0%)	115,20 (0%)	109,44 (5%)	103,68 (10%)	92,16 (20%)	80,64 (30%)	80,64 (30%)
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	-	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	-	-	B (60)	B (61)	B (62)	B (63)	B (64)	B (64)
4	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

C. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaannya yaitu secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya, pada tabel berikut digambarkan indikator kinerja dan target capaian indikator pada akhir periode 2020 berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023 adalah :

Tabel 3.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Akhir Periode Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja		Capaian
				2021		
		2019	2020	Target	Realisasi	
1	Indeks Risiko Bencana	115,20 (0%)	115,20 (0%)	103,68 (10%)	115,20 (0%)	0%
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	100%	100%	60%	60%	100%
3	Nilai SAKIP	-	C (41.20)	B (62)	B (60,73)	97,95%
4	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	100%	100%	0%	0%	100%
Capaian Rata-Rata Indikator Program						74,48%

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD tahun 2021

Tabel 3.5

Analisa Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja		Capaian
				2021		
		2018	2019	Target	Realisasi	

1	Indeks Risiko Bencana	115,20 (0%)	115,20 (0%)	103,68 (10%)	115,20 (0%)	0%
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	100%	100%	60%	60%	100%
3	Nilai SAKIP	-	C (41,20)	B (62)	B (60,73)	97,95%
4	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	100%	100%	0%	0%	100%
Capaian Rata-Rata Indikator Program						74,48%

Sasaran BPBD Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah :

- **Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana dengan Indikator adalah:**
 - **Indeks Risiko Bencana**

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA (RPJMN 2015-2019)



FOKUS AGENDA PEMBANGUNAN PADA PENANGGULANGAN BENCANA

*Pelestarian sumber
 daya alam,
 lingkungan hidup
 dan pengelolaan
 bencana*



Pembangunan nasional dan pembangunan bidang (Buku I dan Buku II RPJMN 2015 – 2019)

"Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi." --> 136 Kabupaten/Kota



Pokok pembangunan kewilayahan Buku II RPJMN 2015 – 2019

"Untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan PRB adalah mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi."

Kebijakan Nasional PB RPJMN 2015 - 2019



Kebijakan Nasional PB RPJMN 2015 - 2019



"Menurunkan Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Berisiko Tinggi."

1. Menurunkan Risiko Bencana
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana

1

Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah

2

Penurunan Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana

3

Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Menurunkan Indeks Resiko Bencana merupakan sebuah harapan yang ingin di wujudkan oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya bagaimana masyarakat mampu beradaptasi dengan potensi risiko bencana yang ada diwilayahnya, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Jayawijaya. Pada tahun 2021 BPBD Kabupaten Jayawijaya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja pada indikator Indeks Resiko Bencana dengan formilasi perhitungan yaitu :

$$\text{“Indeks Resiko Bencana (Risk)} = \frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Di mana:

- Hazard (bahaya) = dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
- Vulnerability (kerentanan) = dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- Komponen Capacity (kapasitas) = dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
 - (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 - (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic;
 - (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Untuk Indeks Risiko Bencana Jayawijaya kali ini dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup Tujuh jenis ancaman yaitu:

1. Gempa bumi,
2. Tanah Longsor,
3. Banjir,
4. Kekeringan,

5. Kebakaran Hutan dan Lahan,
6. Bencana Sosial
7. Pandemi/zoonis wabah

METODOLOGI PENGKAJIAN

Sebagaimana telah disinggung di atas, pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain itu, juga menghasilkan peta risiko untuk setiap potensi bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Tujuan dari metode pengkajian risiko bencana adalah menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang diturunkan dari peta risiko bencana. Peta risiko bencana diperoleh dari overlay peta bahaya, peta kerentanan dan peta

kapasitas. Peta bahaya didapatkan dari komponen probabilitas dan intensitas kejadian bencana. Secara umum metodologi pengkajian risiko bencana dilakukan dengan beberapa proses, yaitu pengambilan data sampai penyajian hasil dari kajian risiko bencana dalam bentuk peta spasial. Data yang diambil akan diolah sehingga menghasilkan indeks risiko bencana. Dari hasil indeks ini, kemudian disusun peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana.

Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitan dari hasil kajian risiko bencana.

METODE ANALISIS DATA

Indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks

risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, komponen kerentanan berupa coping capacities yang merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana.

Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka dalam melakukan perhitungan indeks risiko bencana 2020 adalah komponen bahaya dan kerentanan mengikuti hasil kajian Indeks Risiko Bencana tahun sebelumnya, sedangkan untuk komponen kapasitas dihitung/dinilai per tahun, untuk perhitungan indeks risiko tahun 2020 ini.

Untuk BPBD Kabupaten Jayawijaya, Untuk Kajian Resiko Bencana dalam perencanaan, akan dianggarkan di tahun 2021. Jadi BPBD kabupaten Jayawijaya belum menghitung Indeks Resiko Bencana.

METODOLOGI ANALISIS TINGKAT RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

1. Klasifikasi Data

Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data:

- (1) bahaya per jenis bencana,
- (2) jiwa terpapar per jenis bencana,
- (3) kerugian rupiah per jenis bencana,
- (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan
- (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

2. Pembobotan

Penentuan bobot per jenis bahaya (parameter 1) ditentukan berdasarkan hubungan antara frekuensi kejadian dengan adanya tidak peringatan.

Dari tabel 1 di bawah terlihat bobot per jenis bahaya dan nilai tingkat bahaya 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi.

Bobot kerentanan (parameter 2) berbeda untuk masing-masing jenis bahaya yang dihitung berdasarkan indeks penduduk terpapar dalam jiwa, kerugian dalam rupiah dan kerusakan lingkungan dalam hektar.

Komponen kapasitas (parameter 3) disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Masing-masing parameter kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelas yang kemudian digunakan untuk menghitung indeks risiko bencana dengan menggunakan rumus risiko

Penentuan interval kelas masing-masing indeks jenis bencana dilakukan menggunakan nilai indeks dari kelas 1 untuk rendah, kelas 2 untuk sedang dan kelas 3 untuk tinggi.

Penentuan skor untuk masing-masing parameter dilakukan dengan metode pengkalian antara kelas (1, 2, dan 3) dengan bobot yang telah ditentukan. Skor masing-masing parameter kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk memperoleh skor total bencana di wilayah kabupaten. Tabel berikut menjelaskan detail parameter, kelas, bobot dan skor yang digunakan dalam metode ini.

3. Skoring

Skoring adalah melakukan operasi matematika dengan perkalian antara bobot dan nilai kelas yang telah dibuat. Dalam satu kabupaten/kota, jumlah nilai skoring menunjukkan klasifikasi kerawanan kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi tingkat risiko bencana Dengan menggunakan bobot dan kelas tersebut, klasifikasi tingkat risiko bencana pada kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

Tabel klasifikasi tingkat risiko bencana pada kabupaten/ kota

No	Parameter	Nilai		Kelas	Bobot	Skor (Kelas*Bobot)
A. Bahaya (H)						
1	Gempa Bumi			1	4	4
				2		8
				3		12
2	Banjir			1	4	4
				2		8
				3		12
3	Tanah Longsor			1	4	4
				2		8
				3		12
4	Kekeringan		1	4	4	
			2		8	

				3		12
4	Kebakaran Lahan dan Hutan			1	4	4
				2		8
				3		12
4	Bencana Sosial			1	4	4
				2		8
				3		12
4	Pandemi/zoonis wabah			1	4	4
				2		8
				3		12

No	Parameter	Nilai	Kelas	Bobot	Skor (Kelas*Bobot)
B. Kerentanan (V)					
31.Jiwa terpapar (perkilometer persegi)					
1	Gempa Bumi	<500	1	40%	0,4
		500-1000	2		0,8
		>1000	3		1,2
2	Banjir	<500	1	40%	0,4
		500-1000	2		0,8
		>1000	3		1,2
3	Tanah Longsor	<500	1	40%	0,4
		500-1000	2		0,8
		>1000	3		1,2
4	Kekeringan	<500	1	40%	0,4
		500-1000	2		0,8
		>1000	3		1,2
4	Kebakaran Lahan dan Hutan	<500	1	30%	0,3
		500-1000	2		0,6
		>1000	3		0,9
4	Bencana Sosial	<500	1	30%	0,3
		500-1000	2		0,6

		>1000	3		0,9
4	Pandemi/zoonis wabah	<500	1	30%	0,3
		500-1000	2		0,6
		>1000	3		0,9

No	Parameter	Nilai	Kelas	Bobot	Skor (Kelas*Bobot)
B. Kerentanan (V)					
3. Kerusakan Lingkungan (Hektar)					
1	Gempa Bumi	0	1	0	0
		0	2		0
		0	3		0
2	Banjir	<70	1	10%	0,1
		70-205	2		0,2
		>205	3		0,3
3	Tanah Longsor	<65	1	30%	0,3
		65-185	2		0,6
		>185	3		0,9
4	Kekeringan	<65	1	30%	0,3
		65-185	2		0,6
		>185	3		0,9
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	<65	1	40%	0,4
		65-185	2		0,8
		>185	3		1,2
6	Bencana Sosial	<65	1	30%	0,3
		65-185	2		0,6
		>185	3		0,9
7	Pandemi/zoonis wabah	<65	1	30%	0,3
		65-185	2		0,6
		>185	3		0,9

B. Kerentanan (V)

2. Kerugian (Milyar Rupiah)					
1	Gempa Bumi	<1,55	1	60%	0,6
		1,55 - 3,30	2		1,2
		>3,30	3		1,8
2	Banjir	<1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		>3,30	3		1,5
3	Tanah Longsor	<1,55	1	50%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		>3,30	3		1,5
4	Kekeringan	<1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		>3,30	3		0,9
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	<1,55	1	30%	0,3
		1,55 - 3,30	2		0,6
		>3,30	3		0,9
6	Bencana Sosial	<1,55	1	30%	0,5
		1,55 - 3,30	2		1
		>3,30	3		1,5
7	Pandemi/zoonis wabah	<500	1	30%	0,3
		500-1000	2		0,6
		>1000	3		0,9



Kebijakan penurunan Indeks Risiko Bencana
sampai dengan tahun 2019 sebesar 30%.



Strategi:
menurunkan Indeks Risiko Bencana dengan cara
Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di tingkat
Kab/Kota.



Menggunakan **Indikator** yang didasarkan pada
Sistem PB dan **Manajemen Risiko Bencana**

PEMBAGIAN PERAN

PEMERINTAH PUSAT :

- 1) SEDIAKAN KEBIJAKAN/MODUL/SOP/JUKNIS
- 2) SIAPKAN FASILITATOR
- 3) LAKUKAN AKSI
- 4) MONITORING DAN EVALUASI

PEMERINTAH PROVINSI :

- 1) SIAPKAN FASILITATOR
- 2) LAKUKAN AKSI

PERGURUAN TINGGI :

- 1) SIAPKAN FASILITATOR
- 2) LAKUKAN AKSI

DONOR/INGO/NGO :

- 1) SIAPKAN FASILITATOR
- 2) LAKUKAN AKSI

PENINGKATAN INDEKS KAPASITAS DI KABUPATEN/KOTA

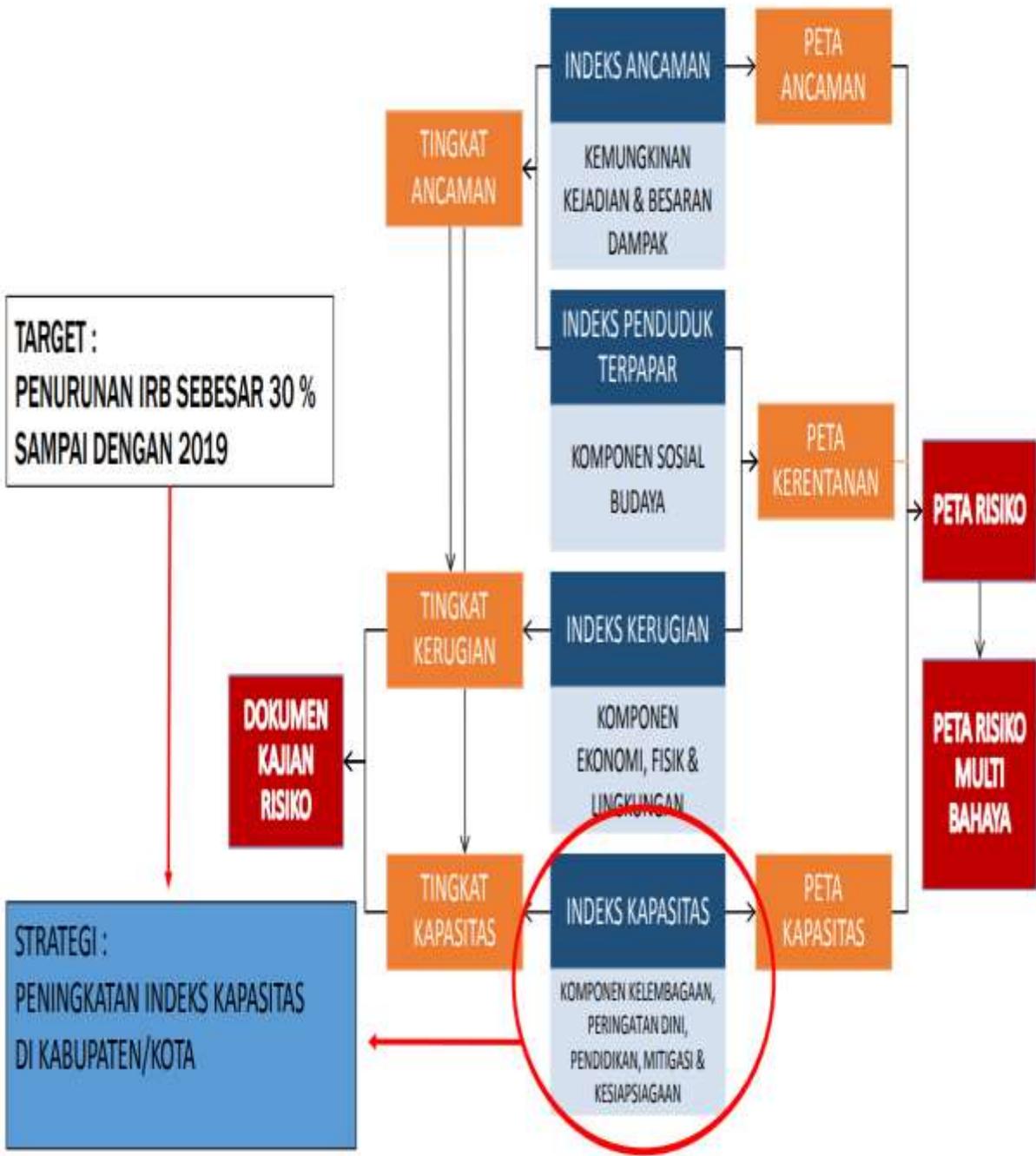


PEMERINTAH KAB/KOTA :

- 1) SIAPKAN FASILITATOR
- 2) LAKUKAN AKSI

METODE PERHITUNGAN INDEKS RISIKO BENCANA 2013

METODE PERHITUNGAN INDEKS RISIKO BENCANA 2013



TANTANGAN PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA

TANTANGAN PENURUNAN INDEKS RISIKO BENCANA



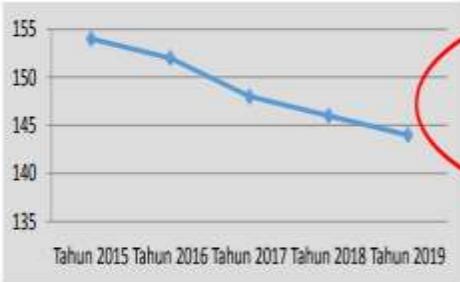
Indeks Hazard :

- Geological hazard = cenderung akan meningkat
- Meteorological hazard = bisa dikurangi bila permasalahan hidrologi diselesaikan dan perlu GERAKAN PRB



Indeks Vulnerability = cenderung akan meningkat

- Adanya demografi dan pembangunan yang meningkat
- Degradasi lingkungan dan perubahan iklim



Penurunan indeks risiko bencana dengan strategi **peningkatan Indeks Capacity (Coping Capacity)** Yang bisa **DITURUNKAN** melalui aktivitas terukur dengan memperkuat kapasitas PB di Kabupaten/Kota

MEMBANGUN KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA

DASAR PELAKSANAAN

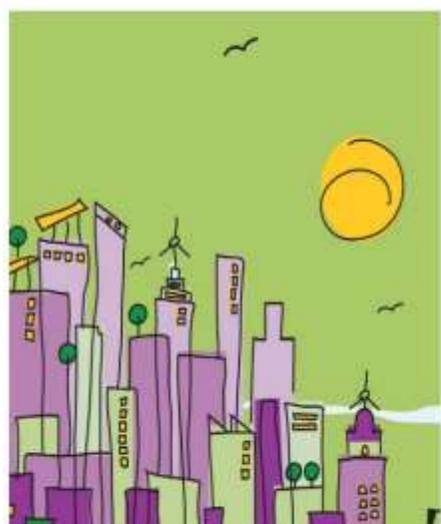
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- **Tujuan XI**, yakni “Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”
- **Tujuan XIII**, yakni “Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya”

MAKING CITIES RESILIENT - MY CITY IS GETTING READY!

Mewujudkan Kota yang Tangguh – Kotaku Siap Hadapi Bencana!

- **Meningkatkan** komitmen para pengambil keputusan di tingkat lokal, sebagai bagian dukungan **kampanye global** Mewujudkan Kota yang Tangguh yang dicanangkan **UNISDR dan organisasi mitra sejak 2010**.
- **Meningkatkan** pemahaman dan **mendorong komitmen** pemerintah daerah dan nasional untuk menjadikan **PRB dan ketangguhan bencana** sebagai **prioritas dalam pembangunan**.
- **Mendukung** perwujudan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sesuai tujuan ke- **11 SDGs** dan sebagai aksi API sesuai dengan tujuan **ke-13 SDGs**.
- **Mendorong** Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk lebih berkomitmen dan bertanggung jawab dalam **melaksanakan SFDRR** yang **terintegrasi dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan**.

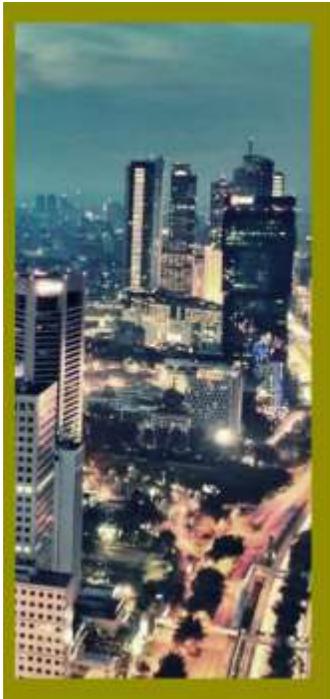


DEFINISI KOTA TANGGUH

- Kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya.
- Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam maupun ancaman terkait iklim.

KOTA TANGGUH BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Siapa para pelaku dan peran masing-masing pelaku?	Bagaimana bentuk organisasi (board) para pelaku? Berbasis pada isu/topik/ancaman?	Fase pelaksanaan Kota Tangguh? Capaian yang diharapkan?	Dampak yang diharapkan? Permasalahan lingkungan, kebencanaan, perubahan iklim, penghidupan?	Lokasi dan pemerintah daerah?
Mekanisme pelaksanaan Ketangguhan Kota?	Upaya untuk mengukur capaian/monev dari Kota Tangguh?	Mekanisme pembiayaan?	Adanya sebuah visi dan kerangka yang kokoh?	Basis konstituen/pemangku kepentingan
Komitmen untuk berjuang jangka panjang	Penelitian tentang strategi membangun Kota Tangguh yang paling sesuai untuk isu yang diperjuangkan	Didukung oleh analisis biaya-manafaat yang jelas	Pemanfaatan Indikator (71 dan score card dan UNISDR Score card)	Dukungan dalam jejaring?



10 LANGKAH MENDASAR

1. Organisasi dan Koordinasi
2. Pengkajian/Skenario Risiko
3. Rencana Keuangan dan Anggaran
4. Pembangunan dan rancangan kota yang tangguh
5. Kawasan Penyangga dan penguatan Ekosistem
6. Kapasitas Kelembagaan
7. Kemampuan Komunitas
8. Infrastruktur Pelindung
9. Kesiapsiagaan dan tanggap bencana
10. Perencanaan pemulihan pasca bencana dan pembangunan lebih baik



10. Perencanaan pemulihan pasca bencana dan pembangunan lebih baik

4 LANGKAH MEWUJUDKAN KOTA TANGGUH

- 1 Penilaian Kab/Kota Tangguh (IKD, Scorecard);
- 2 Identifikasi gap ketangguhan kota dalam rencana pembangunan dan rencana tata ruang dan penggunaan lahan kota;
- 3 Rekomendasi rencana pembangunan dalam bentuk *key resilience investments* dan *strategies to make city more resilient* (PRB masuk dalam musrenbang);
- 4 Sign-up Making Cities Resilient Program (MCR) – UN-ISDR



KAJIAN KAPASITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

Sebagai Dasar untuk Kajian Risiko Bencana & Pengukuran Indeks Risiko Bencana

Kajian kapasitas terdiri dari:

7 fokus prioritas;

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

71 indikator pencapaian;

Rentang nilai ketahanan 1-5.



Dari hasil Kajian Resiko Bencana akan di dapatkan:

1. Peta Resiko Kabupaten Jayawijaya
2. Peta Bahaya Kabupaten Jayawijaya
3. Peta Kerentanan Kabupaten Jayawijaya
4. Peta Kapasitas Kabupaten Jayawijaya

Tabel IRB kabupaten Jayawijaya Berdasarkan IRBI dari tahun 2015 s.d 2018

No	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	Kelas Resiko 2018
19	Jayawijaya	115,20	115,20	115,20	115,20	SEDANG
<p>Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Jayawijaya yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai Kapasitas yang konstan Sehingga untuk mengurangi nilai Indeks Resiko Bencana Nilai Kapasitas perlu ditingkatkan.</p> <p>Tahun 2021 Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Dengan Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana, baru dilakukan pendataan daerah rawan banjir di 4 Distrik dari 40 Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, yaitu Distrik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pisugi 2. Musاتفak 3. Bolakme 4. Usilimo <p>Sedangkan Kajian untuk Kerentanan dan Identifikasi bahaya juga kapasitas Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan penanggulangan Bencana belum dapat dikaji, karena ketersediaan dana yang belum bisa mendukung terlaksanannya Kajian Resiko Bencana.</p>						

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kineja 2021		Capaian
				Target	Realisasi	
1	Indeks Risiko Bencana	115,20 (0%)	115,20 (0%)	103,68 (10%)	0 (0%)	0%

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2020		Capaian Kinerja 2021		2022	2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Indeks Risiko Bencana	109,44 (5%)	0 (0%)	103.68 (10%)	0 (0%)	92.16	80.64

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, karena bencana dapat mengenai siapa saja dan tanpa pandang bulu, Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dan pihak non pemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Data Indeks Risiko bencana di Kabupaten Jayawijaya terdapat 9 Distrik potensi Risiko Tinggi longsor , 14 Distrik Potensi Resiko rawan gerakan tanah, Seluruh wilayah kabupaten Jayawijaya Potensi Risiko Bencana Gempa Bumi, 15 Distrik Potensi Tinggi Bencana Banjir.

a) Permasalahan:

- Tahun Anggaran 2021 BPBD Kabupaten Jayawijaya belum mempunyai Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagai dasar untuk menghitung Indeks Resiko Bencana dimana diharapkan agar setiap tahunnya IRB Kabupaten Jayawijaya selalu menurun.

Dengan demikian untuk tahun 2021 penentuan Indeks Resiko Kabupaten Jayawijaya berdasarkan hasil kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018. Anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana belum dapat memenuhi tersusunya Dokumen Kajian Resiko Bencana. Sehingga baru dapat dilakukan Pendataan Awal pada 4 (empat) Distrik dari 40 Distrik yang ada pada Kabupaten Jayawijaya.

Sedangkan Kajian untuk Kerentanan dan Identifikasi bahaya juga kapasitas Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan penanggulangan Bencana belum dapat dikaji, karena ketersediaan dana yang belum bisa mendukung terlaksananya Kajian Resiko Bencana.

- Peningkatan kapasitas Daerah dalam melakukan pengurangan Resiko Bencana belum terlaksana, dimana Pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum dilaksanakan pada tahun 2021 dimana dalam Dokumen Perencanaan BPBD (RENSTRA BPBD 2018-2023) kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2022, Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic;

- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

b) Solusi:

- Meningkatkan Kapasitas Daerah dengan melaksanakan 7 komponen peningkatan kapasitas daerah, sehingga dapat menurunkan Indeks Resiko Bencana kabupaten Jayawijaya.
- Menyusun Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagai Panduan Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam mengurangi Risiko Bencana.

2. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

- Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar

Kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Siklus Penanggulangan Bencana



Indikator Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar dalam hal ini yang dilakukan BPBD Kabupaten Jayawijaya sejak aktif dari tahun 2015 yaitu pada Kluster Penyaluran bantuan Logistik pada korban bencana yang terdampak , yaitu kejadian bencana kebakaran lahan dan Hutan pada tahun 2015 dan kejadian Bencana Sosial pada tahun 2019 sebanyak 20.000 jiwa penduduk yang terdampak bencana social mendapatkan bantuan evakuasi dan bantuan logistik. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi Bencana Banjir di kabupaten jayawijaya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor:

Tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Kabupaten Jayawijaya:

Jenis Bencana	2015		2019		2021	
	Jumlah korban yang mendapat Pelayanan Penyelama- tan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlah penduduk yang terdam- pak	Jumlah korban yang mendapat Pelayanan Penyelama- tan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlah pendudu k yang terdam- pak	Jumlah korban yang mendapat Pelayanan Penyelama- tan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlah penduduk yang terdam-pak
kejadian bencana kebakara n lahan dan Hutan						
kejadian Bencana Sosial			20.000	20.000		
Capaian			$= \frac{20.000 \times 100}{20.000}$ $= 100\%$			
Pandemi Covid 19						
kejadian bencana Banjir					30.540 jiwa	30.540 jiwa

Berdasarkan Data Diatas, diketahui bahwa Penanggulangan Bencana Banjir dengan indikator:
“Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana “
sesuai Standar

Tabel 3.11.

Data Kinerja Pencapaian Indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar Tahun 2021

Jumlah penduduk yang Mendapat Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota
30.540 jiwa	30.540 jiwa

Dimana Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar didapatkan dari fomula=

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang Mendapat Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar}}{\text{seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota}} \times 100$$

$$= \frac{30.540 \text{ jiwa} \times 100}{30.540 \text{ jiwa}} = 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 215 Tahun 2021, tanggal 08 Februari 2021, **Tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021**, Badan Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan beberapa Stake Holder lintas sektor, telah melakukan pendistribusian Bahan Logistik Bagi Korban Bencana Banjir, pada 23 Distrik, 141 kampung, 7.635 kepala keluarga dengan total **30.540 Jiwa** yang terdampak Bencana Banjir. Dalam menyediakan Logistik bagi korban bencana Banjir BPBD menggunakan **Dana Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).**

Dimana sebelum melakukan pendistribusian Bahan Logistik bagi korban bencana banjir, BPBD melakukan pendataan terlebih dahulu. Setiap Distrik yang terdampak banjir didata Oleh kepala Distrik, kemudian diserahkan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk dilakukan verifikasi data, untuk selanjutnya dilakukan pendistribusian Logistik bagi penduduk yang terdampak bencana banjir pada titik-titik pengungsian pada Gereja dan ada yang dikumpulkan di kantor Distrik.

Dari data yang terkumpul terdapat 7.635 kepala keluarga dengan total 30.540 Jiwa yang menjadi korban bencana Banjir, sehingga dilakukan pendistribusian logistik dilakukan sesuai data yang diterima.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kineja 2021		Capaian
				Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	(0%)	(0%)	60 %	60%	100%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2020		Capaian Kineja 2021		2022	2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
		1	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	40%	0%	60%	60%

Tabel 3.9 Data Kejadian Bencana Alam tahun 2015 - 2021

No	Jenis Bencana	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banjir	-	1	-	-	-	-	1
2	Gempa	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	-	1	-	1	-	-	-
4	Kekeringan	1	-	-	-	--	-	-
5	Kebakaran Lahan dan Hutan	1	--	-	-	-	-	-
6	Bencana Sosial	-	-	-	-	1	-	--
7	Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Pandemi)	-	-	-	-	-	1	-

Berdasarkan data diatas dapat dilihat terdapat bencana yang mengalami penurunan dan adapula yang mengalami peningkatan.

- **Permasalahan**
 - 1) Sarana dan Prasarana atau Peralatan Penanggulangan Bencana yang masih minim
 - 2) Kajian analisis layanan penanggulangan Pasca Bencana perlu dioptimalkan
 - 3) Adanya pndemi Covid 19 menyebabkan kegiatan pada program penanggulangan khususnya sosialisasi ditiadakan.
- **Solusi**
 - 1) Perlu adanya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta menginventarisir peralatan penanggulangan bencana
 - 2) Dilaksanakannya kegiatan analisis kerugian dan kerusakan pasca bencana

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

- **Nilai SAKIP**

Evaluasi kinerja pada Instansi pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implentasi Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran yang diperlukan.

Berikut adalah table penilaian SAKIP:

Tabel penilaian SAKIP

NO	KATEGORI PERINGKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, akuntable.berkinerja tinggi dan sangat akuntable.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntable, bekinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki Sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki Sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki Sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

➤ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berikut adalah table Hasil Evaluasi Kinerja BPBD tahun 2021:

Table Target Evaluasi Kinerja BPBD Tahun 2021:

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan	30	22
b	Pengukuran Kinerja	25	20
c	Pelaporan Kinerja	15	10
d	Evaluasi Internal	10	5
e	Capaian Kinerja	20	5
Nilai Hasil Evaluasi		100	62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Table Realisasi Evaluasi Kinerja BPBD Tahun 2021:

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan	30	23,12
b	Pengukuran Kinerja	25	16,88
c	Pelaporan Kinerja	15	10,78
d	Evaluasi Internal	10	5,20
e	Capaian Kinerja	20	4,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,73
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Tabel Data Nilai SAKIP BPBD Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	C 41,20	B 60,73
Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 BPBD tidak menjadi sampel Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat,								

Tahun 2020 BPBD termasuk dalam sampel evaluasi penilaian SAKIP, dengan total 29 OPD yang menjadi sampel.

- **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan berapa tahun terakhir**

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian Kineja 2021		Capaian
				Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP	-	C (41,20)	B (62)	B (60.73)	97.95%

- **Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan target jangka menengah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2020		Capaian Kinreja 2021			2022	2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
1	Nilai SAKIP	B 60	C (41,20)	B (62)	B (60.73)	97.95%	B (63)	B (64)

➤ **Permasalahan**

- Rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang kami sampaikan pada tahun sebelumnya Sebagian besar telah ditindak lanjuti sehingga terdapat kemajuan yang sangat baik dalam penerapan manajemen kinerja.
- Perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya sudah melakukan penerapan SAKIP sangat baik, namun demikian masih bisa terus ditingkatkan agar dapat memperoleh predikat yang lebih tinggi. Komponen-komponen SAKIP yang masih

Perlu ditingkatkan antara lain meliputi:

a. Perencanaan Kinerja

- Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan
- Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala
- Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan

- Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- b. Pengukuran Kinerja
- IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
 - IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala
 - Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
 - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
 - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
 - Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja
- d. Evaluasi Internal
- Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
 - Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi Perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
 - Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode
 - Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
 - Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
 - Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode
 - Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan Program dimasa yang akan datang
 - Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah-langkah nyata
- e. Capaian Kinerja
- Informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

Solusi

1. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (outcome) serta memastikan bahwa indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan, dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal;
 2. Menyempurnakan perjanjian kinerja ditingkat eselon II sampai ke level yang paling rendah secara berjenjang sebagai penjabaran/cascade down dari sasaran kinerja perangkat daerah, untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang ditetapkan oleh perangkat daerah adalah dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan;
 3. Menyusun rencana aksi sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja perangkat daerah dengan menentukan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
 4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja perangkat daerah maupun individu dan sebagai alat untuk pengendalian kinerja;
 5. Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta memastikan bahwa Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu.
 6. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan.
- **Presentase Anggaran Yang Menjadi Temuan BPK**

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kineja 2021		Capaian
				Target	Realisasi	
1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	0%	0%	100%

Tabel Data Presentase anggaran yang menjadi temuan BPK BPBD Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2015-2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0,008%	0%	0%	0%	0%	0%

Jumlah pagu DPA	Jumlah Temuan	Presentase Anggaran yang menjadi
-----------------	---------------	----------------------------------

TA. 2016	TA. 2016	Temuan BPK
Rp. 2.076.922.461	Rp. 17.000.000	0,008%

Jumlah pagu DPA TA. 2021	Jumlah Temuan TA. 2021	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD
Rp. 2.831.875.966	Rp. 0	0%

Formula perhitungan Presentase anggaran yang menjadi temuan BPK

$$= \frac{\text{Jumlah Anggaran yang menjadi Temuan BPK} \times 100\%}{\text{Jumlah Pagu DPA}}$$

Sehingga didapatkan Presentase anggaran yang menjadi temuan BPK:

$$= \frac{\text{Rp. 0} \times 100\%}{\text{Rp. 2.831.875.966}} = 0\%$$

Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2020			Capaian Kineja 2021			2022	2023
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target
1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%

D. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas keuangan BPBD Kabupaten Jayawijaya merupakan pertanggung jawaban kepala Badan atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan yang sesuai dengan kewenangan BPBD Kabupaten Jayawijaya. Untuk sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian Kabupaten Jayawijaya beserta indikator kerjanya yang dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator yang meliputi indikator makro dan mikro, indikator mikro baik berupa indikator kunci/ultimate outcomes, intermediate outcomes serta immediate outcomes bahkan indikator output sejalan dengan akan dikembangkannya media dan sistem

pengumpulan data kinerja oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut:

Tabel.3.12 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
5	Belanja Daerah	2.496.165.582	2.147.922.028	86,05%
5.1	Belanja Operasi	2.481.165.582	2.132.922.028	85,96%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.840.080.082	1.538.728.428	83,62%
5.1.02	Belanja Barang/Jasa	641.085.500	594.193.600	92,69%
5.2	Belanja Modal	15.000.000	15.000.000	100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	100,00%

Pada sisi Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2021 dari anggaran Setelah Perubahan DPA sebesar Rp. 2.496.165.582,00 terealisasi sebesar Rp. 2.147.922.028,00 atau sebesar 86,05% persen kurang/lebih. Dan Dana Tidak Terduga Sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Belanja Belanja Operasi

Terdiri dari:

- **Belanja Pegawai**

Yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp. 1.840.080.082,00 terealisasi sebesar Rp. 1.538.728.428,00 atau sebesar 83,62%. digunakan untuk membayar gaji pegawai dan tunjangan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya dengan sisa anggaran Rp. 301.351.654,00.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Realisasi belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 594.193.600,00 atau sebesar 92,69% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 641.085.500,00 penghematan anggaran Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 46.891.900,00 lebih rinci belanja langsung yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya dengan 2 (dua) program dan 7 (Tujuh) kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi anggaran Belanja

No	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%

URUSAN : PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR <i>Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</i>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.394.925.582	Rp. 2.048.247.028	85,52%
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 101.240.000	Rp. 99.675.000	98,45%
Jumlah		Rp. 2.496.165.582	Rp. 2.147.922.028	86,05%

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi per kegiatan pada periode yang berakhir s/d per 31 Desember 2021

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Urian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.993.000	25.998.000	3.995.000
Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.006.000	9.916.600	89.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.840.080.082	1.538.728.428	301.351.654
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	10.006.000	9.890.300	115.700

SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.379.000	19.379.000	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	44.992.000	8.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.858.000	142.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.312.000	102.115.700	25.196.300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.200.000	77.600.000	1.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.999.500	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.200.000	147.600.000	1.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000	1.060.000	4.440.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.250.000	61.109.000	6.141.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	101.240.000	99.675.000	1.565.000
Jumlah	2.496.165.582	2.147.922.028	348.243.554

Urian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Dana Tidak Terduga	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	0

LAMPIRAN VII

E. EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN	EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	103,68	0	0 %	101.240.000	99.675.000	98,45%	0
2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana sesuai standar	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	60%	60%	100%	0	1.000.000	0	0
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (61)	B (60,73)	B (99,55%)	39.999.000	35.914.600	89,79%	
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	100%	10.006.000	9.890.300	98,84%	

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon IV
Sub Bagian
Tahun Anggaran

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
: Perencanaan dan Keuangan
: 2021

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja	Kinerja			Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja		
				Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (60)	B (60,73)	99,55%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.000	35.914.600	89,79	B (60)	B (60,73)	99,55
							Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	100%	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.993.000	25.998.000	86,68	3 Dok	3 Dok
							2 Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10.006.000	9.916.600	99,11	1 Dok	1 Dok	100

							Kinerja SKPD						
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.006.000	9.890.300	98,84	2 Dok	2 Dok	100
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	109,44	0%	0%	Program Penanggulangan Korban Bencana Alam	101.240.000	99.675.000	98,45			
							Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
							Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota penampungan sementara	101.240.000	99.675.000	98,45	1 dok	0	0%

2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	60%	60%	100%		1.000.000.000	1.000.000.000	100%	30.540 jiwa	30.540 jiwa	100%
---	---	---	--	-----	-----	------	--	---------------	---------------	------	-------------	-------------	------

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas disampaikan sebagai berikut:

diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya, menetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan BPBD. Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam disebabkan oleh beberapa kendala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan BPBD Kabupaten Jayawijaya BPBD telah menetapkan 3 (Sasaran) sasaran didasarkan pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2018-2023. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan yaitu

1. Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar
Dengan Capaian 100%
2. Nilai Sakip
Dengan capaian (99,55%)
3. Presentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD
Dengan capaian (100%),

1 (satu) Indikator kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik atau belum optimal yaitu **Indeks Resiko Bencana**.

Dimana Target penurunan Indeks Resiko Bencana turun sebesar 10 % yaitu menjadi 103,68. Dengan realisasi 0 (Nol) Dimana:

- Belum maksimalnya peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi resiko bencana.
- Belum Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana secara optimal

- Belum mencukupinya Anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pengurangan resiko bencana

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja BPBD antara lain:

- a) Frekuensi dan intensitas bencana semakin tinggi sejalan dengan :
 - belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Jayawijaya dalam pengurangan risiko bencana. - Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan (menjadikan sungai tempat pembuangan sampah, penebangan liar),
 - Meningkatnya kebutuhan lahan baik untuk keperluan pertanian, industri maupun permukiman yang tidak diimbangi dengan pengaturan tata ruang yang berbasis bencana, termasuk urbanisasi,
 - Pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah mempengaruhi dampak bencana.
 - Kemampuan mitigasi bencana secara umum masih belum memadai, baik mitigasi struktural maupun non struktural.
- b) Belum Tersedianya payung hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pedoman tata kelola penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat Bencana dan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana
- c) Sarana dan prasarana ataupun peralatan penanggulangan bencana yang masih minim
- d) Budaya sadar bencana dari semua pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama dan yang paling utama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta peningkatan SDM dalam penilaian kerugian dan kerusakan pasca bencana
- e) Penanggulangan bencana demikian kompleks dan bersifat multidimensional sehingga urusan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran dan partisipasi masyarakat semakin bertumbuh.
- f) Pengurangan risiko bencana masih mengutamakan paradigma responif belum mencerminkan paradigma preventif
- g) Budaya sadar bencana dari semua pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama dan yang paling utama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta peningkatan SDM dalam penilaian kerugian dan kerusakan pasca bencana
- h) Penanggulangan bencana demikian kompleks dan bersifat multidimensional sehingga urusan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran dan partisipasi masyarakat semakin bertumbuh.
- i) Pemberdayaan dan kolaborasi dengan dunia usaha masih perlu ditingkatkan.
- j) Upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-mata sebagai pengeluaran semata tetapi telah diperhitungkan sebagai investasi pembangunan dan memberikan

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan Menumbuhkan industri kebencanaan, penciptaan lapangan pekerjaan.

- k) Pemberdayaan dan kolaborasi dengan dunia usaha masih perlu ditingkatkan.
- l) Upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-mata sebagai pengeluaran semata tetapi telah diperhitungkan sebagai investasi pembangunan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan Menumbuhkan industri kebencanaan, penciptaan lapangan kerja serta mendorong majunya IPTEK, dan serta meminimalisasi kerugian dan kerusakan hasil pembangunan nasional di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Strategi pemecahan masalah yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021 yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan kebencanaan. Untuk dasar hukum pada kegiatan-kegiatan kebencanaan agar melakukan peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dengan membangun kerangka regulasi yang jelas. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan anggaran tanggap darurat, BPBD terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kedepan juga perlu dilaksanakan upaya-upaya yang lebih baik lagi dengan melakukan evaluasi dari penetapan skala prioritas kegiatan Badan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang, oleh karena itu masukan masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LAKIP dapat tercapai lebih baik lagi.

Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jayawijaya



AMSAL WAMU, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
NIP. 19670919 198610 1 001